



DAPATKAH USAHA KECIL MENJADI BASIS PERLUASAN KESEMPATAN KERJA YANG LAYAK?

Resmi Setia M.S¹

Abstract

This literature study is done in the frame of globally viewing the roles of small entrepreneurs, as well as viewing their position in the efforts of extending job opportunities. Small enterprises have been proven potential in absorbing labors and giving better work conditions, as well as giving appropriate income and social warranties.

The extension of job opportunities have become important, as it can provide the alternatives of fields for the labors terminated from the formal sectors, as well as for the blue workers being unable to 'dive' into the formal sectors owing to their insufficient qualifications.

Pendahuluan

Studi literatur ini dilakukan dalam rangka melihat peran usaha kecil secara makro dan melihat kedudukannya dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Berbagai strategi perluasan kesempatan kerja telah coba ditawarkan oleh lembaga-lembaga internasional

seperti USAID (US Agency for International Development)², GIAT (Growth Through Investment and Trade), ILO (International Labour Organization), dsb, maupun lembaga pemerintah melalui Bappenas, Depperindag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.³ Strategi yang

¹ Peneliti Yayasan AKATIGA.

² Lihat Dokumen Strategi Perluasan Kesempatan Kerja yang dipersiapkan untuk USAID.

³ Menurut UU RI No. 9/1995 tentang usaha kecil (UK). Kriteria UK dibuat berdasarkan besarnya modal yang ditanam yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dengan penjualan hasil tahunan paling banyak Rp. 1 milyar. BPS membuat kriteria UK berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap, yaitu 5-19 orang.

DAPATKAN USAHA KECIL MENJADI BASIS PERLUASAN KESEMPATAN KERJA...

dikembangkan oleh lembaga-lembaga tersebut terbagi ke dalam dua pendekatan utama, yaitu perluasan kesempatan kerja melalui fleksibilisasi pasar kerja dan penguatan lembaga-lembaga pasar kerja (ILO, 2004). Target pendekatan pertama lebih ditekankan pada sektor modern/formal, sedangkan yang berikutnya pada penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Jika dilihat secara seksama, kedua pendekatan tersebut tidak difokuskan langsung pada upaya pengurangan kemiskinan, tetapi lebih melihat kemungkinannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan lapangan kerja, baik untuk kelompok miskin maupun kelompok masyarakat lainnya. Perluasan kesempatan kerja melalui sektor modern/formal memang tidak secara khusus melihat kelompok miskin sebagai sasaran utama, melainkan lebih melihat kepada kelompok masyarakat yang memiliki kualifikasi tertentu, baik tingkat pendidikan maupun keterampilan. Sementara itu, meskipun target utama perluasan kesempatan kerja melalui UK adalah kelompok miskin, tetapi upaya mengurangi kemiskinan hanya menjadi efek samping. Selain berbagai pendekatan tersebut, terdapat upaya-upaya lain yang

dilakukan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Strategi yang dikembangkan agak berbeda, yaitu lebih menekankan pada pemberdayaan kelompok miskin. Strategi ini merespons faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, yaitu masalah struktural yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber daya seperti ekonomi, politik, dsb.⁴ Pendekatan terakhir ini lebih difokuskan kepada para pelaku usaha mikro/kecil dan struktur yang menghambat mereka untuk melakukan akumulasi dalam pengertian yang lebih luas.

Di mana posisi AKATIGA dalam berbagai pendekatan tersebut? Menanggapi tingginya angka pengangguran serta kondisi kerja dan jaminan sosial yang rendah, maka studi literatur ini akan difokuskan pada penguatan usaha kecil (UK) yang terbukti potensial menyerap tenaga kerja, mampu memberikan kondisi kerja yang baik, serta memberikan pendapatan dan jaminan sosial yang layak. Konsep layak yang dimaksud di sini mengacu kepada terbukanya kemungkinan para pengusaha dan pekerja di sektor UK untuk mengakumulasi uang, pengetahuan, jaringan, dan reproduksi usaha.⁵ Cara melihat konsep kelayakan di sini berbeda dengan yang biasa dipergunakan di usaha modern/formal, yang biasanya mengacu pada tingkat upah minimum, kebutuhan hidup layak, dsb.

⁴ Lihat Notulen Workshop SDC, 10-11 Januari 2002 dengan topik "Current Trends in Pro-poor Small and Micro Enterprises Development", Conference Centre Schloss Munchenwiler/Murten.

⁵ Hasil diskusi dengan Isono Sadoko, 26 Juli 2004.

Dalam hal ini kita tidak hanya melihat tingkat upah yang diberikan, tetapi juga mengidentifikasi jaminan sosial lain seperti bantuan sekolah, pinjaman untuk biaya pengobatan, dsb.⁶ Selain itu, sumbangan dari sektor-sektor usaha lain juga perlu diperhitungkan, contohnya bagi buruh yang melakukan diversifikasi usaha/pekerjaan karena curahan waktu bekerja di usaha kecil tidak sepanjang dan seketat di pabrik modern/formal, sehingga memungkinkan buruhnya untuk memiliki lebih dari satu pekerjaan.

Pada akhirnya, studi literatur ini diharapkan bisa menunjukkan contoh-contoh usaha kecil yang bisa memenuhi kriteria di atas dan mampu mengatasi kendala-kendala usaha baik internal maupun eksternal yang

sering menjadi penghambat berkembangnya UK.

Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Indonesia

Angka pengangguran terbuka di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2003 jumlah pengangguran sudah melebihi 10 juta orang atau hampir mencapai 10% dari keseluruhan angkatan kerja yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan timpangnya jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Angka tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring dengan munculnya angkatan kerja baru. Tabel di bawah ini akan memperjelas gambaran lapangan kerja, angkatan kerja, dan pengangguran yang ada di Indonesia pasca krisis.

Tabel 1
Lapangan Kerja, Angkatan Kerja, dan Pengangguran
1999-2003

Tahun	Tambah Lapangan Kerja (juta)	Angkatan Kerja Baru (juta)	Pengangguran Terbuka	
			Juta	%
1999	1,14	2,11	6,03	6,26
2000	1,14	0,94	5,81	6,07
2001	0,97	3,16	8	8,10
2002	0,84	1,97	9,13	9,06
2003	1,10	2,10	10,13	9,85

Sumber: Sakernas BPS (2000-2002); Bappenas (2003) dikutip oleh Bisnis Indonesia, 30 September 2003.

⁶ Lihat Safaria, dkk (2003) dan Benda-Beckmann (2000).

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata tambahan lapangan kerja per tahun selama periode 1999-2003 hanya mencapai sekitar 1 juta orang per tahun. Sementara itu, angkatan kerja baru bertambah sekitar 2 juta orang per tahunnya, belum termasuk korban PHK dan sisa angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja melalui berbagai sektor dan skala usaha. Seperti yang telah disebutkan di atas, tulisan ini akan terfokus pada perluasan kesempatan kerja melalui UK. Argumen tersebut akan diperkuat dengan sajian data-data statistik mengenai kemampuan penyerapan tenaga kerja serta sumbangan PDB UK dibandingkan dengan skala usaha lainnya.

Kondisi Investasi Terkini

Kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis terus mengalami

perbaikan. Ini tampak dari meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dari 3,5% pada tahun 2001, 3,7% tahun 2002, dan 3,99% tahun 2003 (ISBRC & PUPUK, 2003; Bisnis Indonesia, 30 September 2003). Namun kenaikan tersebut lebih banyak dipicu oleh tingginya konsumsi domestik dan pemerintah. Sementara komponen lainnya seperti investasi dan ekspor cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian, kenaikan angka pertumbuhan ekonomi tidak bisa langsung dilihat sebagai indikator membaiknya situasi pasar kerja dan iklim usaha di Indonesia. Secara umum total investasi berdasarkan skala usaha dari tahun 2000-2003 mengalami penurunan cukup tajam dari 14,18% pada tahun 2000 hingga 1,36% tahun 2003. Titik investasi terburuk terjadi tahun 2002 yang hanya mencapai 0,21%.⁷ Hal ini diperkuat dengan data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengenai nilai investasi PMDN dan PMA yang tertera di Tabel 2.

⁷ Sumber: Berita Resmi Statistik No. 21/VII/24 Maret 2004 yang disusun melalui kerjasama BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 2
Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal
1998-2002

Tahun	PMDN			PMA		
	Nilai (Rp. Miliar)	%	Jml Proyek	Nilai (juta US\$)	%	Jml Proyek
1998	57.938,3	-51,7	320	13.585,5	-59,8	1.034
1999	53.120,2	-8,3	228	10.892,2	-19,8	1174
2000	92.410,4	74,0	355	15.426,2	41,6	1.524
2001	58.816,0	-36,4	264	15.055,9	-2,4	1.---
2002	25.262,3	-57,0	181	9.744,1	-35,3	1.135

Sumber: Litbang Kompas (data diolah dari BKPM 2003) dikutip oleh ISRBC & PUPUK, 2003:116

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi investasi pada tahun 2002 hampir sama buruknya dengan situasi pada masa krisis ekonomi 1998. Bahkan investasi PMDN lebih buruk daripada masa krisis. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan keadaan sektor riil pada umumnya. Menurunnya investasi di sektor riil (*Foreign Direct Investment*) akan berpengaruh terhadap pasar kerja di Indonesia, terutama jika penurunan terjadi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak (*labor intensive industries*). Lapangan kerja akan mengalami pengurangan sementara jumlah angkatan kerja semakin menumpuk.

Penurunan investasi yang cukup menyolok terjadi di sektor manufaktur sub sektor TPT (Tekstil dan Produk Tekstil). Berdasarkan data Bank Indonesia, ekspor tekstil yang pada Januari 2003 mencapai 262 juta dolar, bulan Agustus 2003 turun drastis

menjadi 10,1 juta dollar. Penurunan ini menyebabkan PHK besar-besaran. Tahun 2002 jumlah PHK di sektor ini mencapai 19 ribu buruh dan tahun-tahun berikutnya terus meningkat terutama pasca penghapusan kuota awal tahun 2005. Jumlah kuota TPT Indonesia tahun 2002 mencapai 47%. Diperkirakan hilangnya jatah kuota satu persen akan mengakibatkan PHK 10 ribu buruh atau sekitar 470 ribu buruh yang terancam PHK (Dinamika, 2003). Selain itu, dari 1,2 juta tenaga kerja yang terserap di sektor TPT, sebagian besar berstatus kerja tidak tetap (kontrak). Hal ini merupakan strategi yang dianggap efektif untuk menjawab ketidakstabilan permintaan dan menekan biaya produksi. Apalagi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 melegalkan mekanisme fleksibilisasi tersebut termasuk sistem *outsourcing*.

Sektor Modern Formal vs Kondisi Perburuhan

Hasil analisis beberapa pihak menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya daya tarik berinvestasi di Indonesia, yaitu persoalan moneter/finansial (tingginya suku bunga, kebijakan pajak), maraknya pungutan liar dan birokrasi yang berbelit-belit sebagai dampak otonomi daerah, ketidakpastian hukum dan keamanan, dan masalah perburuhan (Aaron Carl, dkk, 2004; Wick, 2004; Sudrajat, 2004). Melalui *pro-jobs growth strategy*, lembaga-lembaga donor seperti GIAT dan USAID coba menawarkan solusi dengan melakukan reformasi tata pemerintahan, menstabilkan makro ekonomi, merevisi kebijakan non tarif yang membatasi perdagangan internasional, kebijakan investasi dan perdagangan domestik, dan kebijakan perburuhan dengan membuka praktik fleksibilisasi seluas-luasnya dan meninjau kembali masalah kenaikan upah minimum dan uang pesangon. Isu yang terakhir ini sangat didukung oleh Bappenas (2003) yang menganggap UU ketenagakerjaan No. 13/2003 terlalu membatasi fleksibilisasi, dsb, sehingga menghambat masuknya investasi dan pada akhirnya mengurangi upaya perluasan kesempatan

kerja. *Pro-jobs growth strategy* juga menekankan bahwa perluasan kesempatan kerja melalui sektor modern/formal (usaha besar) terkait dengan peningkatan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Industri modern formal dianggap mampu memberikan upah, kondisi kerja yang lebih baik, dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor informal (UK). *Apakah memang benar demikian?*

Dari sisi perburuhan, strategi yang ditawarkan tersebut sangat merugikan kelompok buruh dan mengancam kelangsungan sumber penghidupannya. **Argumen pertama**, strategi fleksibilitas produksi yang dipilih sebagai salah satu strategi penyerapan tenaga kerja memiliki berbagai kelemahan seperti mendorong terja-dinya *labour turn over* yang tinggi. Semakin lama, masa kerja buruh semakin singkat.⁸ Hal ini juga tidak mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi karena jumlah buruh keluar dan masuk sama, dengan hanya lebih menekan biaya produksi agar upah yang dikeluarkan tetap rendah.⁹ **Kedua**, anggapan bahwa tingkat produktivitas dan output di sektor modern lebih tinggi daripada industri kecil juga masih perlu diperjelas.

⁸ Hasil penelitian Akatiga (1999) memperlihatkan bahwa usia produktif buruh terutama buruh perempuan, menjadi semakin pendek, yaitu berkisar antara 17-25 thn.

⁹ Suplai buruh baru secara terus menerus menjamin tingkat upah yang rendah, sehingga buruh-buruh yang sudah cukup lama bekerja akan di-PHK karena dianggap tidak produktif dan digantikan oleh buruh baru (tidak berpengalaman) yang bisa dibayar lebih murah.

Meskipun tingkat produktivitas di industri besar lebih besar tetapi biaya produksi yang dikeluarkan (meliputi upah, tekno-logi) juga jauh lebih besar. Jadi nilai tambah/output yang dihasilkan juga perlu diperhitungkan kembali karena besarnya relatif terhadap biaya produksi. **Ketiga**, pilihan perluasan kesempatan kerja melalui sektor modern/formal mensyaratkan buruh yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi (minimal SMA). Semen-tara itu, banyak tenaga kerja di Indo-nesia yang tingkat pendidikannya masih rendah sehingga tidak bisa mengakses kesempatan kerja yang ada. Hal ini juga semakin membatasi peluang kelompok miskin, terutama yang berpendidikan rendah, untuk bekerja di sektor formal. Dengan demikian, tujuan mengurangi kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja di sektor formal/modern tidak sepenuhnya bisa menjangkau kelompok-kelompok miskin. Hal penting lainnya adalah kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor formal sangat terbatas sementara jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, sektor formal tidak bisa dijadikan satu-satunya andalan upaya perluasan kesempatan kerja.

Dalam *World Summit for Social Development and Millenium Development Goals* yang ditunjukkan melalui laporan yang disusun oleh *The ACC*

Task Force on Full Employment and Sustainable Livelihoods, tampak bahwa sektor formal/modern memang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, tetapi tidak memberikan kondisi kerja yang baik dan menimbulkan diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki.¹⁰ Forum tersebut juga menekankan pentingnya sumber penghidupan yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, dalam rangka membuka kesempatan kerja bagi kelompok miskin, maka pendekatan tersebut dianggap tidak *pro-poor employment*. Oleh karena itu, upaya perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha kecil bisa menjadi salah satu jawabannya. Hal ini disebabkan, tidak adanya kriteria khusus bagi para pekerjanya dan UK terbukti berhasil menjadi sandaran kegiatan ekonomi di masa-masa krisis.

Perluasan kesempatan kerja di sektor usaha kecil menjadi penting karena bisa menyediakan pilihan lapangan kerja bagi buruh yang terlempar dari sektor formal dan buruh yang tidak bisa masuk ke sektor formal karena tidak memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Sektor UK juga terbukti memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi krisis, terutama sektor UK yang bergerak di pasar yang tak terjangkau industri besar, tidak tergantung *input* impor dan kredit dari sektor perbankan, serta lebih melayani kelompok

¹⁰ Hasil penelitian AKATIGA (lihat Verdi Yusuf, 1991 dan Indrasari Tjandraningsih, 1991) juga menunjukkan kondisi kerja yang dialami buruh yang bekerja di sektor formal untuk ekspor sangat buruk.

pembeli berpenghasilan rendah (elastisitas pendapatan negatif). Saat krisis 1998 kontribusi UK terhadap pembentukan PDB naik 1,55% menjadi 42,00%.

Pengembangan UK tidak dapat dilakukan secara seragam, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam kaitannya dengan Usaha Besar (UB), maka UK dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. UK yang bersaing (kompetitif) dengan UB karena barang yang dihasilkan serupa (sama).
- b. UK yang komplementer dengan UB karena memiliki kaitan vertikal atau horisontal di luar pasar dengan UB.
- c. UK yang memiliki spesialisasi dalam menghasilkan barang-barang untuk segmen pasar khusus yang berada di luar jangkauan industri besar (Hill, 1995:4 dikutip oleh Thee Kian Wie, 1996:5-6).

Kategori UK yang akan dijadikan sasaran perhatian di studi literatur ini adalah UK yang mandiri (c) dan/atau memiliki kaitan dengan UB (b). Apabila UB mengalami guncangan, maka UK jenis ini masih tetap mampu bertahan karena masih memiliki segmen pasar tersendiri yang tidak terjangkau UB dan memiliki spesialisasi produk sendiri.

Sumbangan UK dalam Ekonomi Makro Indonesia

Data menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terserap di UK tahun 1997 sekitar 57,5 juta (lebih dari 80% angkatan kerja di Indonesia). Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai 65,3 juta orang pada tahun 2001 atau tumbuh rata-rata 3,22% per tahun. Data terkini memperlihatkan bahwa jumlah UK pada tahun 2004 diperkirakan mencapai 41,36 juta unit atau sekitar 99,99% jumlah unit usaha di Indonesia. Jumlah serapan tenaga kerjanya diperkirakan mencapai 74,6 juta orang atau sebesar 99,45% dari penyerapan tenaga kerja nasional.

Data tersebut membuktikan kemampuan UK dalam menyerap tenaga kerja memang cukup tinggi. Angka penyerapan tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997/1998, UK ternyata mampu membuktikan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang jumlahnya membengkak akibat kolapsnya industri-industri besar. Sebagai ilustrasi, di bawah ini diperlihatkan tabel dan gambar yang memperlihatkan kemampuan usaha kecil dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2000-2001 dibandingkan dengan usaha menengah dan besar.

Tabel 3
Penyerapan Tenaga Kerja UK, UM, UB Menurut Sektor Ekonomi
Tahun 2000-2001 (orang)

No	Sektor	2000			2001		
		UK	UM	UB	UK	UM	UB
1	Pertanian, peternakan, kehutanan, & perikanan	31,795,114	730,752	38,127	34,079,337	754,649	39,359
2	Perdagangan, hotel, & restoran	15,887,344	1,427,618	27,196	16,682,274	1,499,050	28,556
3	Industri pengolahan	8,154,656	3,553,767	234,876	7,592,509	3,771,252	249,250
4	Jasa-jasa	3,658,744	992,013	36,582	3,704,193	1,004,336	37,037
5	Pengangkutan & komunikasi	3,395,347	241,284	11,570	2,560,107	258,881	12,366
6	Bangunan	253,532	229,756	4,993	256,651	232,583	5,055
7	Pertambangan & penggalan	238,818	101,084	10,153	249,132	104,450	10,591
8	Keuangan, persewaan, & jasa perusahaan	111,614	261,834	12,802	114,898	269,538	13,178
9	Listrik, gas, & air bersih	6,721	92,290	10,114	7,193	98,760	10,823
	Jumlah	63,501,890	7,630,398	386,413	65,246,294	7,993,499	406,215

Sumber: Menegkop & UKM (2001) dikutip oleh ISRBC dan PUPUK (2003)

Dari sembilan sektor ekonomi tersebut terdapat tiga sektor utama yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor industri pengolahan.

Jumlah Unit UK dan Sumbangannya terhadap PDB

Berikut ini akan diperlihatkan mengenai perkembangan jumlah unit UK selama kurun waktu 1997-2001 (pra hingga pasca krisis). Selain itu juga dijelaskan mengenai sumbangan PDB yang diberikan UK. Selama ini UK dianggap tidak mampu memberikan sumbangan PDB yang signifikan, padahal data di bawah ini menun-

Tabel 4
Jumlah Unit UK Menurut Sektor Ekonomi
Tahun 1997-2001

Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
Pertanian, peternakan, kehutanan, & perikanan	22,511,588	23,097,871	23,174,579	23,516,865	23,756,081
Pertambangan & penggalian	204,413	137,284	132,617	134,748	140,567
Industri pengolahan	2,817,379	2,104,856	2,526,163	2,713,857	2,874,383
Listrik, gas, & air bersih	13,434	7,319	4,492	4,835	5,174
Bangunan	199,253	122,945	102,332	110,183	111,539
Perdagangan, hotel, & restoran	9,986,510	8,325,351	8,688,215	9,212,900	9,673,872
Pengangkutan & komunikasi	1,852,401	1,507,629	1,707,762	1,867,288	1,995,727
Keuangan, persewaan, & jasa perusahaan	71,334	18,519	24,143	25,423	26,171
Jasa-jasa	2,048,349	1,439,915	1,499,206	1,535,251	1,554,322
Jumlah Unit UK	39,704,661	36,761,689	37,859,509	39,121,350	40,137,836
Jumlah Unit UM	60,449	51,889	52,214	55,437	57,743
Jumlah Unit UB	2,097	1,831	1,885	1,946	2,095

Sumber: Menegkop & UKM (2001) dikutip oleh ISRBC dan PUPUK (2003)

jukkan situasi sebaliknya.

Untuk memudahkan gambaran mengenai jumlah unit UK yang telah

disajikan dalam tabel 4 maka di bawah ini akan diuraikan persentase jumlah unit UK dari 1997-2001.

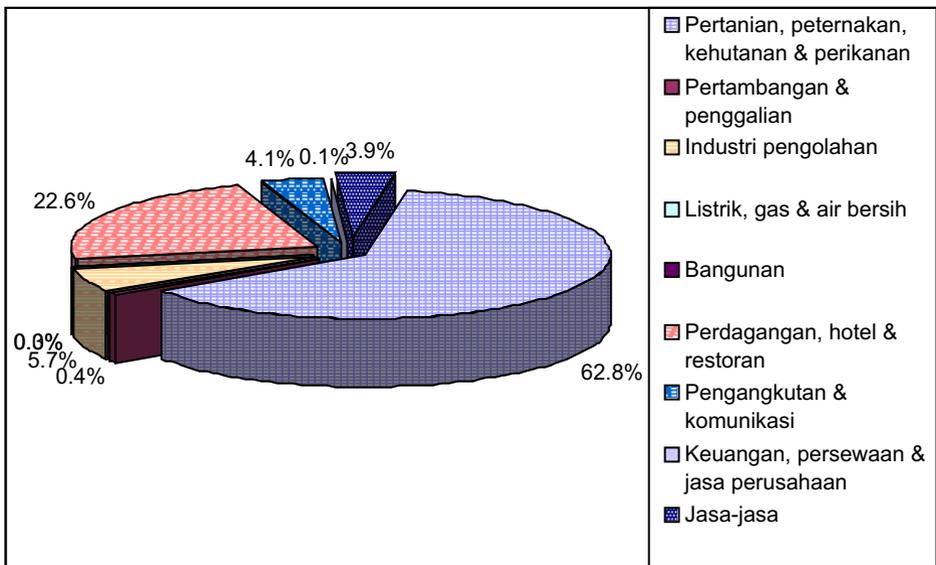
Gambar 1
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 1997



Dari gambar 1 terlihat bahwa sektor-sektor seperti sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor industri pengolahan

menjadi tiga sektor yang memiliki jumlah unit UK terbesar dibandingkan sektor UK lainnya. Data tersebut diperkuat oleh besarnya penyerapan tenaga kerja di ketiga sektor tersebut.

Gambar 2
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 1998



Saat krisis jumlah tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian mengalami peningkatan dari 22.511.588 menjadi 23.097.871. Sementara itu, tenaga kerja sektor industri peng-

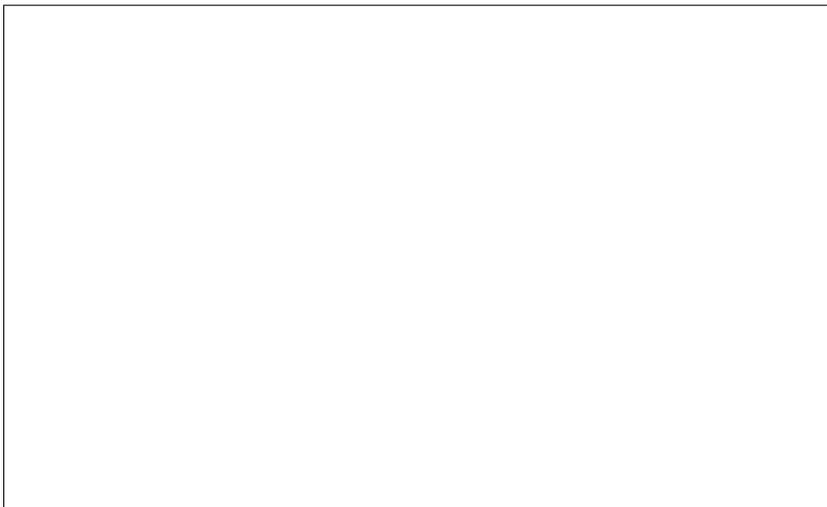
olahan dan perdagangan, hotel, dan restoran mengalami penurunan. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah unit UK dan tenaga kerja yang terserap terus mengalami peningkatan, terutama di ketiga sektor unggulan tadi.

Gambar 3
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 1999



Gambar 3 menunjukkan bahwa situasi UK pasca krisis relatif stabil dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang sempat mengalami penurunan saat krisis di tahun 1999

Gambar 4
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 2000



DAPATKAN USAHA KECIL MENJADI BASIS PERLUASAN KESEMPATAN KERJA..

mulai menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2000, sektor pertanian mengalami penurunan 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kedua sektor unggulan lainnya

mengalami peningkatan. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran meningkat sebesar 0,6%, sementara sektor industri pengolahan meningkat 0,2%.

Gambar 5
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 2001



Mengacu pada kondisi UK di tiga sektor unggulan sebelum dan setelah krisis yang relatif stabil dan terus mengalami peningkatan, maka stimulan investasi sebaiknya didorong ke sektor-sektor tersebut. Hal ini berkaitan dengan minimnya penyerapan investasi di UK dibandingkan dengan UB dan UM, padahal penciptaan nilai tambah UK terus mengalami

peningkatan dari 39,7% pada tahun 2000 menjadi 41,1% pada tahun 2003. Kondisi ini bertolak belakang dengan penciptaan nilai tambah di UB yang terus mengalami penurunan dari 45,5% tahun 2000 menjadi 43,3% pada tahun 2003. Sementara itu, peranan UM relatif stabil berkisar pada 15% selama periode tersebut.

Tabel 5
Rata-rata Penyerapan Investasi Tahun 2000-2003

Skala Usaha	Investasi (Miliar Rp)	Investasi (%)	Unit Usaha	Investasi per unit (juta Rp)
UK	58,884.00	19%	40,138,823.00	1,5
UM	73,191.00	23%	56,709.00	1,290.60
UB	185,043.00	58%	2,024.00	91,424.20
Total	317,118.00		40,197,556.00	

Sumber: Berita Resmi Statistik No 21/VII/24 Maret 2004

Tabel 5 memperlihatkan investasi yang terserap di masing-masing skala usaha selama 2000-2003. Terlihat dengan jelas bahwa investasi yang terserap di UK sangat kecil dibandingkan UB dan UM dan berbanding terbalik dengan jumlah unit usahanya.

sumbangan PDB yang diberikan oleh UK, UM, dan UB. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumbangan PDB melalui UK kompetitif dengan sumbangan yang diberikan oleh UB dan mengalahkan sumbangan dari UM. Hal ini seharusnya bisa menjadi pertanda yang baik bagi perkembangan UK di masa mendatang.

Di bawah ini diuraikan mengenai

Tabel 6
Rata-rata Struktur PDB UK, UM dan UB
Tahun 2000-2003

Sektor	Rata-rata 2000-2003 (%)		
	Kecil	Menengah	Besar
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, & perikanan	85,74	9,09	5,17
Pertambangan & galian	6,73	2,96	90,30
Industri pengolahan	15,14	12,98	71,89
Listrik, gas, & air bersih	0,52	6,80	92,68
Bangunan	43,88	22,57	33,55
Perdagangan, hotel, & restoran	75,60	20,81	3,59
Pengangkutan & komunikasi	36,69	26,64	36,67
Keuangan, persewaan, & jasa	16,80	46,47	36,73
Jasa-jasa	35,59	17,19	36,60
PDB	40,55	15,22	44,24
PDB tanpa migas	46,22	17,19	36,60

Sumber: Berita Resmi Statistik No 21/VII/24 Maret 2004

DAPATKAN USAHA KECIL MENJADI BASIS PERLUASAN KESEMPATAN KERJA...

Tabel 7 menjelaskan dengan detail kontribusi output yang disumbangkan UK bagi pembentukan PDB selama kurun waktu 1997-2001. Terlihat bahwa sumbangan UK cukup stabil

dan terus mengalami peningkatan. Bahkan ketiga sektor unggulan memperlihatkan pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan sektor lainnya.

Tabel 7

Kontribusi Output UK terhadap Pembentukan PDB Tahun 1997-2001 (Rp Juta)

Sektor	Tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)
	1997	1998	1999	2000	2001	
Pertanian, perkebunan, peternakan,	83,454,932	146,658,258	187,287,927	187,819,982	204,468,353	0,2511
kehutanan, & perikanan	8,183,374	7,990,917	8,349,025	9,443,345	10,863,750	0,0734
Pertambangan & galian	24,507,695	38,554,590	42,729,739	48,323,480	55,691,083	0,2278
Industri pengolahan Listrik, gas, & air bersih	52,047	75,772	85,196	91,007	101,739	0,1824
Bangunan	20,496,578	27,473,126	32,935,451	40,692,018	46,547,198	0,2276
Perdagangan, hotel, & restoran	74,627,738	112,465,649	133,445,906	147,516,548	167,829,510	0,2246
Pengangkutan & komunikasi	14,359,080	20,538,794	21,944,873	24,615,667	29,322,919	0,1954
Keuangan, persewaan, & jasa	8,882,435	12,341,036	12,944,873	14,632,657	16,503,999	0,1675
Jasa-jasa	19,361,227	33,670,744	39,076,677	42,225,922	47,030,614	0,2285
PDB	253,925,106	399,768,886	478,799,667	515,360,626	578,359,165	
% terhadap total	43,93	47,16	47,65	46,12	45,55	

Sumber: Menegkop & UKM (2001) dikutip oleh ISRBC dan PUPUK (2003)

Permasalahan Utama Usaha Kecil di Indonesia

Disamping berbagai potensi, ternyata UK di Indonesia juga memiliki berbagai persoalan yang menghambat perkembangan dan ketahanan usahanya. Berdasarkan hasil Konferensi Nasional Usaha Kecil di Cipanas, 4-6 Agustus 1997, masalah-masalah yang dihadapi usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Permodalan

- Suku bunga kredit perbankan masih tinggi, sehingga kredit menjadi mahal.
- Kurangnya informasi sumber pembiayaan dari lembaga keuangan non-bank termasuk informasi jenis sumber pembiayaan serta persyaratan dan prosedur pengajuan.
- Sistem dan prosedur kredit dari lembaga keuangan bank dan non-bank rumit dan lama. Waktu tunggu pencairan kredit juga tidak pasti.
- Kurangnya informasi dari perbankan mengenai standar proposal pengajuan kredit, sehingga pengusaha kecil tidak mampu membuat proposal yang sesuai dengan kriteria perbankan.
- Kurangnya pemahaman dari perbankan mengenai kriteria UK dalam menilai kelayakan suatu UK, sehingga jumlah kredit yang disetujui seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan UK.

2. Pemasaran

- Lemahnya kekuatan tawar pengusaha kecil ketika berhadapan dengan pengusaha besar, terutama dalam menentukan harga, sistem pembayaran, dan pengaturan tata letak produk usaha kecil di *department store* dan *supermarket*.
- Asosiasi pengusaha atau profesi belum berperan dalam mengkoordinasi pemasaran produk usaha kecil, sehingga sering menimbulkan persaingan tidak sehat antarusaha sejenis.
- Informasi untuk memasarkan produk di dalam maupun luar negeri masih kurang. Misalnya informasi mengenai produk yang diinginkan: siapa pembeli, di mana tempat pembelian, bagaimana potensi pasar, bagaimana tata cara memasarkan produk, serta bagaimana tender pekerjaan utamanya pada usaha jasa.

3. Bahan Baku

- Pasokan bahan baku kurang memadai dan berfluktuasi, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan ekspor dan impor yang berubah-ubah, pembeli besar yang menguasai bahan baku, serta keengganan pengusaha besar untuk membuat kontrak dengan pengusaha kecil.
- Harga bahan baku masih terlalu tinggi dan berfluktuasi

karena struktur pasar masih bersifat monopolistik atau dikuasai pedagang besar.

- Kualitas bahan baku rendah, antara lain karena tidak adanya standardisasi dan adanya manipulasi kualitas bahan baku.
- Sistem pembelian bahan baku secara tunai sementara pembayaran penjualan produk umumnya tidak tunai menyulitkan pengusaha kecil.

4. Teknologi dan SDM

- Sulitnya memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja terampil, antara lain karena lembaga pendidikan dan pelatihan kurang dapat menghasilkan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan UK.
- Kurang dan tidak meratanya akses dan sumber informasi teknologi, apalagi upaya penyebarluasannya yang masih minim.
- Spesifikasi peralatan yang sesuai dengan kebutuhan (teknologi tepat guna) sukar diperoleh.
- Lembaga independen belum ada dan belum berperan, khususnya lembaga yang mengkaji teknologi yang ditawarkan oleh pasar kepada UK sehingga teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Peranan instansi pemerintah, non pemerintah, dan perguruan tinggi dalam mengidentifikasi, menemukan, menye-

barluaskan, dan melakukan pembinaan teknis tentang teknologi baru atau teknologi tepat guna bagi UK masih kurang intensif.

5. Manajemen

- Sulitnya menemukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha, antara lain karena pengetahuan dan kemampuan manajerial pengusaha kecil relatif rendah. Akibatnya pengusaha kecil belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat.
- Pemisahan antara manajemen keuangan perusahaan dan keluarga atau rumah tangga belum dilakukan, sehingga pengusaha kecil sering mengalami kesulitan dalam mengontrol dan mengatur *cash flow* serta membuat perencanaan dan laporan keuangan.
- Kemampuan pengusaha dalam mengorganisasi diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak sendiri (*one man show*).
- Kurang efektifnya berbagai pelatihan manajemen yang ada (materi terlalu banyak dan tidak sesuai kebutuhan, tidak ada kegiatan pendampingan pasca pelatihan).
- Produktivitas karyawan masih rendah sehingga pengusaha sulit memenuhi ketentuan UMR. Rendahnya produktivitas

berkaitan dengan tingkat pendidikan, etos kerja, disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas karyawan yang rendah.

6. Birokrasi dan Pungutan

- Perijinan tidak transparan, mahal, berbelit-belit, diskriminatif, adanya ketidakpastian, serta adanya tumpang tindih vertikal (antara pusat daerah) dan horisontal (antarinstansi).
- Penegakan dan pelaksanaan hukum dan berbagai ketentuan masih kurang serta cenderung kurang tegas.
- Pengusaha kecil dan asosiasi UK kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang UK.
- Pungutan atau biaya tambahan dalam pengurusan perolehan modal dari dana penyisihan laba BUMN dan sumber modal lainnya cukup tinggi.
- Mekanisme pembagian kuota ekspor tidak mendukung UK untuk mampu mengekspor produknya.
- Banyak pungutan yang seringkali tidak disertai pelayanan memadai.

7. Infrastruktur

- Biaya listrik, air, dan telepon tinggi, serta sering mengalami gangguan. Pelayanan petugas juga kurang baik.
- *Bounded Zone*, seperti PIK dan

LIK kurang dilengkapi prasarana yang memadai seperti jalan, listrik, telepon, air, serta fasilitas penanganan limbah.

8. Kemitraan

- Kemitraan antara UK dengan UM dan UB dalam pemasaran dan sistem pembayaran, baik produk maupun bahan baku, dirasakan belum bermanfaat.
- Kemitraan antara UK dengan UM dan UB dalam transfer teknologi masih kurang.

Dari penjelasan mengenai persoalan di atas, tampak bahwa UK memiliki kesulitan dalam mengakses lembaga-lembaga formal, baik untuk keperluan bantuan kredit ataupun lainnya. Sifat keinformalan UK seringkali menjadi indikator ketidakpastian dan kerentanan usaha tersebut. Bank atau lembaga formal sulit mengeluarkan dana kredit atau bantuan bagi UK karena tidak mampu memenuhi persyaratan,¹¹ misalnya tidak terdaftar, dsb, sehingga mempengaruhi kepercayaan untuk masalah pengembalian pinjaman. Namun hal ini banyak mengalami perubahan, terbukti dengan munculnya berbagai bantuan untuk mengembangkan UK mulai dari bantuan kredit, bantuan teknis, kemitraan, dsb, terlepas dari persoalan keberhasilan berbagai program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian AKATIGA

¹¹ Lihat Bisnis Indonesia, Jumat, 16 Juli 2004, artikel yang berjudul "Beri Kesempatan yang Sama kepada UKM".

(2003) yang berjudul, "Pola-pola eksploitasi terhadap usaha kecil", tampak bahwa ada tiga macam persoalan yang menghambat usaha kecil, yaitu: (1) persoalan internal UK, khususnya kapasitas manajemen; (2) persoalan infrastruktur yang menghubungkan UK dengan sumber modal, manajemen, teknologi, pelatihan; (3) persoalan relasi eksploitatif yang terdapat dalam rantai hulu-hilir UK. Pemahaman mengenai struktur menjadi sangat penting karena berguna dalam memetakan berbagai kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang mengganjal UK.¹²

Selain berbagai persoalan tersebut, dalam penelitian berikutnya AKATIGA juga akan menyoroti persoalan relasi sosial, ekonomi, dan politik di UK yang sangat bias gender. Berdasarkan hasil diskusi dengan para perempuan pengusaha kecil yang tergabung dalam Persepsi tampak bahwa relasi gender yang timpang (diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan) bisa menjadi penghambat perempuan untuk mengembangkan usahanya dan mengakses sumber daya.

Perkembangan Pendekatan Penguatan UK

Seiring dengan menjamurnya UK, sejak tahun 1970-an mulai bermunculan berbagai pendekatan untuk mengembangkan UK. Apa saja

pendekatan-pendekatan tersebut? Secara singkat terdapat tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan kesejahteraan (pemerataan) berupa bantuan langsung (subsidi kredit, bantuan teknis (BIPIK), dan proteksi lainnya). Namun hal ini tidak berjalan lancar atau banyak mengalami kegagalan. Kemudian dikembangkan juga program bantuan tidak langsung, seperti kemitraan. Ternyata program ini juga kurang berjalan baik (Hill, 1995:19 dikutip oleh Thee Kian Wie, 1996:4-5).
- b. Pendekatan yang lebih mengutamakan pendekatan efisiensi yang meliputi peningkatan kemampuan UK dalam hal manajemen, teknologi, pemasaran, serta usaha untuk menghilangkan berbagai kendala yang menghambat perkembangan UK (idem).
- c. Pendekatan yang difokuskan untuk mengubah pola relasi ekonomi, sosial, dan politik yang bias gender baik melalui perubahan kebijakan maupun pemberdayaan pelaku UK.

Hasil riset AKATIGA selama kurun waktu 1990-2000-an juga telah menunjukkan berbagai perubahan. Pada awal tahun 1990-an, hasil-hasil penelitian AKATIGA tentang UK dalam kaitannya dengan proyek identifikasi peluang kerja di sektor non pertanian pedesaan menunjukkan bahwa persoalan UK banyak disebabkan oleh persoalan internal termasuk pema-

¹² Lihat kata pengantar dari Thee Kian Wie

saran, namun beberapa studi juga sudah mulai mengidentifikasi masalah-masalah struktural. Tetapi saat ini perhatian mulai bergeser ke persoalan struktural yang menghambat UK. Meskipun demikian, persoalan internal UK juga tetap diidentifikasi sebagai penghambat keberhasilan UK.

Tiga Kisah Sukses Usaha Kecil

Indikator yang dipergunakan untuk melihat UK yang berhasil adalah (1) kemampuannya mengatasi kendala, dan (2) mampu memberikan kondisi yang lebih baik/layak bagi pengusaha/pekerjanya. Studi literatur ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi terkini dan komprehensif mengenai UK yang berhasil dan situasi pekerjanya, karena perkembangan UK yang begitu dinamis. Selain itu, dalam pembahasan UK, faktor tenaga kerja seringkali luput dari perhatian. Data-data tahun 1990-an kurang *valid* karena telah banyak mengalami perubahan di tingkat makro & mikro yang mempengaruhi eksistensi UK, terutama di sektor-sektor tertentu.

Kasus-kasus di bawah ini diperoleh dari berbagai artikel di media massa sehingga data yang disajikan kurang lengkap dan perlu dikaji lebih lanjut. Tapi setidaknya kasus-kasus ini bisa dijadikan dasar pijakan untuk melakukan pendalaman. Dari berbagai kasus tampak bahwa usaha kecil yang mengandalkan sumber daya alam mampu bertahan, apalagi target pemasarannya khusus yang tidak terjangkau oleh industri besar. Selain itu barang yang dihasilkan juga cukup khas dan berbeda dengan hasil produksi industri besar. Dari dua di antara tiga kasus di bawah ini, tampak jelas bahwa strategi pemasaran tidak hanya tergantung oleh pasar ekspor, tetapi juga pasar lokal, sehingga jika salah satunya mengalami penurunan tidak akan mengakibatkan kebangkrutan/tutupnya usaha. Bantuan dari pemerintah juga memainkan peranan yang cukup berarti bagi kelangsungan industri ini, setidaknya untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses pasar, modal, birokrasi, dan pelayanan dari lembaga-lembaga pemerintah yang berfungsi mengembangkan UK.

Kasus 1

Usaha Kerajinan Logam di desa Pasir, Kab. Banyumas

Di daerah Pasir terdapat sekitar 200 pengrajin besi dan emas. Desa Pasir Wetan dan Pasir Lor khusus untuk pengrajin besi, sedangkan desa Pasir Kidul dan Pasir Kulon menjadi sentra pengrajin emas. Di desa Pasir Wetan terdapat sebuah usaha kerajinan logam yang cukup berhasil, yaitu PT. Sinar Etsa, milik Toto (40). Ia melakukan pemasaran produk di pasar domestik dan ekspor. Proses ekspor sendiri dilakukan oleh PT. Dadap Sembada Karya di Indramayu. Hasil produk PT. Sinar Etsa (SE) dibeli setengah jadi oleh PT.

Dadap yang akan menyelesaikannya hingga siap ekspor. Setiap bulannya PT. SE harus bisa menyelesaikan 1500 mainan/jenis dan 400 lampu lilin. Mainan dihargai Rp 15.000,-/unit dan lampu lilin Rp 75.000,-/unit. Selain melayani pesanan untuk ekspor, PT. SE juga memproduksi alat-alat pertanian, penyadap, emblem/logo. Bahan baku diperoleh dari daerah Tegal berupa besi apkir/sisa. Saat ini PT. SE mencoba mengembangkan usaha baru yaitu perakitan mobil lokal dan suku cadangnya. Untuk mewujudkannya diperlukan modal yang cukup besar. Oleh karena itu, PT. SE berharap ada investor yang bersedia bekerja sama. Keinginan ini juga mendapat dukungan dari Disperindag.

Penghasilan kotor perbulan PT. SE sekitar 45-50 juta dan berhasil menyerap tenaga kerja harian sebanyak 30 orang. Mereka diupah sekitar 10.000-20.000/hari tergantung ketrampilannya.

Hambatan:

- Kesulitan bahan baku, terutama untuk memenuhi pasar ekspor. Untuk mendapatkannya seringkali harus survei ke berbagai kota.
- Kesulitan untuk mencari penggunting kaleng, terutama untuk bahan baku lokal. Oleh karena itu, mereka mencoba meminta bantuan ibu-ibu rumah tangga sekitar 60 orang sebagai tenaga kerja lepas.

Sumber: Kompas, Kamis, 12 Februari 2004

Kasus 2

Usaha Tenun Tradisional Donggala, Sulawesi Tengah

Sentra kerajinan tenun sutra Donggala di Banawa, Wani, Palu, Parigi. Sarung biasa berharga Rp. 250 ribu dan kemasan satu set sarung, jas & selendang dipasarkan seharga Rp. 500 ribu. Sebagian pekerjanya adalah anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Pengusaha ini menyiasati ketidakstabilan pasar dengan melakukan promosi melalui media dan pameran. Hal ini mendapat dukungan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulteng

Hambatan:

- Ketinggalan teknologi masih menggunakan ATBM sehingga seringkali tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Strateginya adalah melimpahkan produksi ke pengusaha tenun lain.
- Perlu inovasi produk agar tidak ketinggalan dengan produk tenun tradisional dari daerah lain seperti Bugis, Batak, & Nusa Tenggara. Proses inovasi ini mendapat bantuan dari biro desain & mutu Dekranasda.

Sumber: Bisnis Indonesia, 8 Maret 2004

Kasus 3 Kerajinan Bambu di Bali

Aneka jenis anyaman bambu buatan pengrajin Bali menghasilkan devisa sedikitnya US\$ 9,7 juta selama Januari-Oktober 2003 atau naik 54% dibanding periode sama tahun lalu. Pemasarannya dilakukan secara lokal dan ekspor. Kenaikan ini disebabkan kemampuannya dalam melakukan inovasi atau membuat desain baru sesuai perkembangan dengan harga terjangkau. Desa Belega terkenal dengan kerajinan bambu berupa lidu-lidu, gringsing, kursi, lemari, meja makan, dan tongkat yang berfungsi sebagai tempat keris. Barang-barang tersebut banyak diminati oleh turis Australia. Sementara anyaman bambu dengan kombinasi rotan berupa tempat koran, bakul, dan topi berbentuk kerucut digemari oleh konsumen Eropa. Produk tas dan dompet disukai oleh wisatawan Jepang dan AS. Saat tragedi bom di Kuta dan wabah SARS, usaha anyaman ini tetap berjalan.

Sumber: Bisnis Indonesia, 17 Desember 2003

Kesimpulan

- Perkembangan UK cukup dinamis, terutama yang memiliki keterkaitan dengan sub sektor TPT termasuk sepatu. Usaha kecil pada tahun-tahun sebelumnya cukup berkembang tapi di tahun-tahun ini tampaknya akan mengalami penurunan karena terjadi kolaps (akibat turunnya permintaan, kalah bersaing dengan produk cina yang lebih murah, dsb). Dengan demikian, UK sulit sekali untuk dijadikan basis andalan perluasan kesempatan kerja, seperti yang terjadi di awal tahun 1990-an.
- Secara umum tingkat penyerapan tenaga kerja melalui UK sangat besar dan juga berpotensi untuk memperluas kesempatan kerja. Hal ini terkait dengan tingginya angka pertumbuhan lapangan kerja melalui UK. Kondisi tersebut diharapkan bisa mengimbangi atau menyiasati besarnya pertumbuhan angkatan kerja nasional. Namun potensi UK tidak didukung dengan penyerapan investasinya yang hingga saat ini masih sangat minim (lihat tabel 5). Padahal UK terbukti memberikan sumbangan PDB yang cukup besar, meskipun angkanya masih berada di bawah sumbangan PDB UB. Namun demikian, situasi ini mulai mengalami perubahan yang ditunjukkan dengan penurunan nilai tambah UB, sementara situasi sebaliknya terjadi di UK. Dari tahun ke tahun nilai tambah UK memperlihatkan kenaikan (Tabel 6).
- Untuk mendorong berkembangnya UK, pemerintah bisa memberikan prioritas perhatian kepada tiga sektor unggulan yang stabil

selama masa krisis dan cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan nilai tambah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus pada masalah produktivitas, terutama di sektor pertanian yang tingkat produktivitasnya masih sangat rendah dibandingkan sektor lainnya. Usaha kecil mampu menjadi basis perluasan kesempatan kerja karena kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Namun untuk membuktikan apakah secara kualitas mampu memberikan kondisi kehidupan dan kerja yang lebih baik bagi buruhnya masih perlu dikaji dan dibuktikan lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

- Berdasarkan hasil penelusuran, literatur mengenai UK ternyata tidak banyak yang mengangakat

persoalan tenaga kerja. Sebagian besar hanya terfokus pada kegiatan usaha dan faktor-faktor yang menghambat usahanya baik yang berkaitan dengan manajemen usaha maupun struktural. Oleh karena itu, studi UK berikutnya sangat perlu untuk melihat persoalan di UK dalam kaitannya dengan isu perburuhan. Namun cara melihatnya agak berbeda dengan yang biasa dipergunakan dalam mengkaji hubungan perburuhan di industri formal.

- Sektor modern/formal memang tetap diperlukan tetapi tidak bisa dijadikan satu-satunya andalan perluasan kesempatan kerja karena kondisi makro ekonomi yang tidak stabil. Apalagi bagi sektor modern berorientasi ekspor yang sangat tergantung terhadap permintaan pasar internasional.

Daftar Pustaka

- Aaron, Carl, dkk. 2004. *Strategic Approaches to Job Creation and Employment in Indonesia*. Report prepared for The United States Agency for International Development, Jakarta Mission. 4 Februari.
- AKATIGA dan The Asia Foundation. 1999. *Krisis dan daya tahan masyarakat miskin di Indonesia. Recent Developments*. Bandung: Yayasan AKATIGA dan The Asia Foundation.
- Basjir, W. Wahyu. 2003. "Informalisasi dan Tantangan Perburuhan". *Jurnal Analisis Sosial*. Vol. 8 No. 3 Desember. Bandung: AKATIGA.
- Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann dan Hands Marks (eds.). 2000. *Coping With Insecurity: An "underall" perspective on social security in the third world*. Yogyakarta/Nijmegen: Pustaka Pelajar dan Foocal Foundation.

- BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM. 2004. "Indikator Makro Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003". *Berita Resmi Statistik No. 21/VII/24 Maret*.
- Dewayanti, Ratih. 2004. *Desain Studi Advokasi Perempuan Usaha Kecil 2004-2006*. Bandung: AKATIGA.
- Dir. Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas. 2003. *Kajian Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan dan Dampaknya Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja*. Jakarta: Bappenas.
- Endang Suhendar (ed.). 1995. *Tanah, Buruh, dan Usaha Kecil dalam Proses Perubahan: Kumpulan Ringkasan Hasil Penelitian AKATIGA*. Bandung: AKATIGA.
- Executive Summary Follow Up to The World Summit for Social Development UN ACC Task Force on Full Employment and Sustainable Livelihood*. Geneva, March 27, 1997.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). 1998. *Masalah-masalah di seputar usaha kecil Indonesia: prosiding konperensi nasional usaha kecil, Cipanas, 4-6 Agustus 1997*. Jakarta: ISEI, Kadin dan TAF.
- ILO. 2004. *Seri Rekomendasi Kebijakan Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: ILO.
- ILO. 2004. "Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektorial". *Seri Rekomendasi Kebijakan Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: ILO.
- ILO. 2004. "Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah, dan Ekonomi Lokal)". *Seri Rekomendasi Kebijakan Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: ILO.
- ISBRC dan PUPUK kerjasama dengan LP3E Kadin Indonesia. 2003. *Usaha kecil Indonesia: tinjauan tahun 2002 dan prospek tahun 2003*. Jakarta: ISBRC PUPUK.
- Manning, Chris. 1998. *Indonesian Labour in Transition: An East Asian Success Story?*. UK: Cambridge University Press.
- Safaria, Anne Friday, dkk. 2003. *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek*. Bandung: AKATIGA.

DAPATKAN USAHA KECIL MENJADI BASIS PERLUASAN KESEMPATAN KERJA...

- SDC workshop. 2002. Current trends in pro-poor small and micro enterprise development. Switzerland: Intercooperation SED Backstopping mandate. *SDC Workshop, January 10-11.*
- Siregar, Safaruddin (ed.). 2002. *Usaha kecil dan mikro di tengah arus globalisasi: pengalaman usaha kecil dan mikro dampingan Bitra Indonesia.* Medan: Bitra Indonesia.
- Sudrajat, Ade. 2004. Proyeksi Industri TPT Tahun 2005. Makalah yang disajikan dalam simposium "Berakhirnya Perjanjian Perdagangan Tekstil dan Pakaian dan Masa Depan Industri Pakaian di Indonesia - Implikasinya Terhadap Modal dan Buruh", tanggal 8 Juni di Hotel Kemang, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan industri skala kecil di Indonesia.* Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Thee Kian Wie. 1993. Industrial structure and small and medium enterprise development in Indonesia. EDI Working papers. Economic Development Institute of The World Bank.
- _____. 1994. *Industrialisasi di Indonesia: berbagai kajian.* Jakarta: LP3ES.
- _____. 1996. *Mengembangkan daya saing industri kecil dan menengah di era perdagangan bebas.* Jakarta: Pusat Ekonomi Pembangunan LIPI.
- Tjandraningsih, Indrasari (ed.). 1991. Tenaga Kerja Pedesaan pada Industri Besar Sepatu Olahraga Untuk Ekspor: Studi Kasus Tangerang dan Bogor. Seri *Working Paper*-Juli. Bandung: AKATIGA.
- Usman, Marzuki dan Harry Seldadyo (ed.). 1997. "Kiat sukses pengusaha kecil". *Jurnal Keuangan & Moneter.* Jakarta: Badan Analisa Keuangan & Moneter, Dep. Keuangan RI bekerjasama dengan Institut Bankir Indonesia.
- Wick, Ingeborg. 2004. Permainan Global Menyangkut Kancing dan Kerah: Akhir dari Perjanjian Textile Dunia Mempertajam Perbedaan Sosial. Makalah yang disampaikan dalam simposium "Berakhirnya Perjanjian Perdagangan Tekstil dan Pakaian dan Masa Depan Industri Pakaian di Indonesia - Implikasinya Terhadap Modal dan Buruh", tanggal 8 Juni di Hotel Kemang, Jakarta.
- Widyaningrum, Nurul, dkk. 2003. *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil.* Bandung: AKATIGA.

Yusuf, Verdi. 1991. Pembentukan Angkatan Kerja di Industri Garmen Untuk Ekspor, Pengalaman dari Bandung Jawa Barat. Seri *Working Paper*-Februari. Bandung: AKATIGA.

Surat Kabar dan Buletin:

Bisnis Indonesia, 30 September 2003.
Bisnis Indonesia, 17 Desember 2003
Bisnis Indonesia, 8 Maret 2004
Bisnis Indonesia, 16 Juli 2004.
Kompas, 12 Februari 2004.
Kompas, Selasa, 29 Juni 2004. Halaman 19.
Dinamika catatan akhir tahun 2003.

Dokumen:

UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Website:

www.depkop.go.id
www.sentrakukm.com

